

## Pemberdayaan Komunitas Dalam Pengembangan Ekonomi Desa

**Rahmat Hidayat<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>hidayatrahmat05@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjelaskan proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengidentifikasi peran para pemangku kepentingan, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Langkat dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri kerupuk Ikan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Masyarakat, Pembangunan, Ekonomi

### Abstract

This research aims to describe forms of community economic empowerment, explain the process of implementing community economic empowerment, identify the roles of stakeholders, and analyze various obstacles faced in community economic empowerment in rural areas. Through a qualitative approach, the results of this research show that community economic empowerment in Langkat Regency can be implemented well. Therefore, the policy of economic empowerment of village communities has a positive impact on improving the welfare of communities involved in the fish cracker industry.

**Keywords:** Empowerment, Community, Development, Economy

### PENDAHULUAN

Saat dunia memasuki era globalisasi, hal terpenting yang harus dihindari adalah Kesenjangan semakin besar karena hanya bidang, industri, atau organisasi yang lebih maju yang dapat memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh ekonomi. Ini belum dieksekusi dengan benar; Telah terjadi krisis ekonomi, yang menyebabkan kesulitan lain yang membebani pemerintah dan masyarakat dan cukup sulit untuk diselesaikan. Karena fokus pemerintah dipandang tidak memadai dan hanya melayani kepentingan kelompok ekonomi yang lebih maju, komunitas pelaku ekonomi kecil, atau yang disebut UKM, merasa ditinggalkan. Sebenarnya, agar ekonomi usaha kecil yang mencakup koperasi dapat mengejar ketertinggalan dan mampu memanfaatkan momentum globalisasi untuk ekspansinya, perlu ditekankan pada pemilihan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Pelaku ekonomi yang lemah harus dipilah dan diberdayakan untuk menutup kesenjangan yang ada dalam pembangunan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak atas standar hidup yang terhormat dan diharuskan untuk mengambil bagian dalam inisiatif yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran penduduk. Menurut sudut pandang ini, kemiskinan juga merupakan kewajiban bersama, artinya setiap orang harus berpartisipasi aktif dalam upaya memberantas kemiskinan (Sumadiningrat, 1993). Akibatnya, di era reformasi ini, usaha kecil termasuk peternak kecil, peternak kecil, peternak ikan, usaha menengah, dan koperasi diberikan kesempatan yang sama dengan korporasi besar karena pergeseran dari paradigma pertumbuhan ke paradigma pembangunan yang bergantung pada pemerataan distribusi dengan kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, tidak ada kerugian yang terjadi antara organisasi kecil dan menengah, dan mereka bahkan dapat berkolaborasi dengan perusahaan lain dengan lebih sukses dan saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan taktik yang digunakan dalam pengembangan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kapasitas dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kader Masyarakat (Pasal 1 ayat (8)). Strategi untuk mencapai kemampuan dan kemandirian adalah dasar

dari komunitas yang diberdayakan. Tujuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa adalah untuk memberdayakan masyarakat agar mencapai potensi dan kemandiriannya di masyarakat, negara, dan negara.

Untuk mengatasi penurunan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh krisis ekonomi, diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh dan efisien, seperti yang diuraikan dalam program pembangunan nasional (Propenas) 2001-2005. Program ini menekankan pentingnya pelaksanaan inisiatif pemberdayaan masyarakat guna memperbaiki keadaan ekonomi. Kesenjangan dalam pembangunan adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi dan memerlukan solusi melalui pemihakan serta pemberdayaan yang nyata bagi pelaku ekonomi yang lemah (Somoediningrat, 1997).

Menurut Somoediningrat (1997), ketimpangan adalah fakta pembangunan yang harus diatasi melalui diskriminasi dan pemberdayaan aktor karena ekonominya jelas lemah. Untuk mencapai hal tersebut, akan dilakukan upaya untuk menjauh dari paradigma pertumbuhan dan menuju paradigma pembangunan yang bergantung pada kesetaraan dengan kekuatan ekonomi individu, usaha kecil, bisnis, dan koperasi dengan memberi mereka kesempatan yang sama dengan perusahaan besar.

Oleh karena itu, akan dilakukan pergeseran dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pembangunan yang berfokus pada pemerataan melalui penguatan ekonomi rakyat, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, dengan memberikan mereka kesempatan yang setara dengan yang diberikan kepada usaha besar.

Konsep pemberdayaan menjadi paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Priyono (1996) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab secara lebih efektif dalam struktur, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam aspek politik, ekonomi, psikologi, dan lainnya. Pemberdayaan masyarakat mencakup pengembangan, kemandirian, swadaya, dan penguatan posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap berbagai kekuatan penekan di semua bidang dan sektor kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya dipahami sebagai suatu langkah untuk mempercepat dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga efektivitasnya memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menciptakan pola pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Merupakan kebangkitan kembali dari Program Gerakan Pengentasan Kemiskinan Terpadu (Gerdu-Taskin) yang dilaksanakan sejak tahun 2002 hingga 2009 dan dimaksudkan sebagai program strategis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan berfokus pada pemberian peluang bagi pertumbuhan partisipasi masyarakat, kemandirian, dan kemandirian khususnya di Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan kategori hampir miskin untuk mengembangkan usaha ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM), Mendorong sektor riil dan meningkatkan skala bisnis dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia, sumber modal, dan infrastruktur bisnis serta. Melalui program-programnya, Pembangunan Daerah telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan. Inisiatif tersebut antara lain JPS, GKD (Gerakan Kembali ke Desa), Gardu Taskin (Gerakan Mendukung Pengentasan Kemiskinan), dan pendampingan langsung ke Desa Tertinggal Non-IDT. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mengembangkan industri kecil atau rumah tangga. Berikut ini adalah beberapa rumusan isu berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas: (1) Bagaimana sektor publik dan swasta berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat? dan (2) Apa saja variabel yang memfasilitasi dan menghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan?

Pengertian pengembangan masyarakat dan pembangunan berbasis masyarakat merupakan bagian dari gagasan pemberdayaan (pengembangan masyarakat, pembangunan berbasis masyarakat). Sehubungan dengan pemahaman ini, penting untuk terlebih dahulu memahami pentingnya dan makna pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan merupakan "keharusan" untuk menjadi lebih diberdayakan oleh upaya sendiri dan perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan seseorang tanpa bergantung pada bantuan dari koneksi luar. Orang-orang yang telah mencapai tujuan bersama diberdayakan oleh kemandiriannya. Mardikanto (2012).

Dalam konteks masyarakat, pemberdayaan mengacu pada kapasitas individu untuk membangun pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan martabat tingkat masyarakat yang ada, yang tidak mampu melepaskan diri dari jerat keterbelakangan dan kemiskinan dalam keadaan saat ini. Dengan kata lain, komunitas yang diberdayakan adalah komunitas yang otonom dan memungkinkan. Kata "kekuasaan" adalah akar dari kata "pemberdayaan."

Kemampuan individu, terutama kelompok yang lemah dan kurang beruntung, untuk (a) mencapai persyaratan mendasar mereka disebut sebagai pemberdayaan. Untuk: (a) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan mereka dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan; (b) berpartisipasi dalam proses pengembangan dan keputusan yang berdampak pada mereka; dan (c) memiliki kebebasan, dalam arti bahwa mereka tidak hanya bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan rasa sakit (Edi, 2010).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan martabat mereka yang hidup dalam kondisi di bawah standar sehingga mereka dapat membebaskan diri dari siklus kemiskinan dan keterbelakangan. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan menginspirasi dan memotivasi mereka untuk mengubah potensi mereka menjadi tindakan nyata. Gagasan pertumbuhan ekonomi yang merangkum cita-cita sosial adalah pemberdayaan masyarakat. Gagasan ini merupakan paradigma baru untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberdayakan, partisipatif, dan berpusat pada masyarakat. Gagasan pemberdayaan lebih luas daripada hanya mencoba menyediakan kebutuhan mendasar atau bertindak sebagai perlindungan terhadap lebih banyak proses kemiskinan. Zubeedi (2013).

Inisiatif pemberdayaan yang diuraikan Hogan di atas juga terkait dengan inisiatif untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dalam kerangka kesejahteraan sosial. Tentu saja, dengan melihat penyebab de-pemberdayaan dalam suatu masyarakat.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita, dan tingkat pertumbuhan PDB di tingkat nasional dan regional digunakan untuk menggambarkan laju pembangunan ekonomi. Karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah tujuan dari pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan, tidak mungkin untuk memisahkan kedua konsep tersebut. Perbedaannya adalah, dalam arti yang paling mendasar, pembangunan harus mencakup masalah material dan keuangan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi hanya mencakup upaya masyarakat untuk memperluas aktivitas ekonomi dan meningkatkan tingkat pendapatan di masyarakat (Arsiyah 2002).

Pembangunan empiris adalah bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional dalam penciptaan UUD 1945 alinea keempat adalah untuk melindungi warga negara Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, mempromosikan kesejahteraan universal, menjunjung tinggi budaya Bangsa, serta mendorong partisipasi dan aktivitas di dunia yang berbasis kemerdekaan, abadi perdamaian, dan kemajuan sosial.

Tujuan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah untuk meningkatkan kebahagiaan publik dan masyarakat. Strategi pembangunan nasional untuk tahun 2004-2009 dituangkan dalam Pasal Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia untuk tahun 2004-2009, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2005. Agenda ini dimaksudkan untuk meningkatkan

tingkat kesejahteraan warga negara Indonesia, mempromosikan Indonesia yang adil dan demokratis, serta menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Pembangunan daerah Kabupaten Langkat melalui berbagai program seperti Gardu Taskin (Gerakan Mendukung Pengentasan Kemiskinan), bantuan langsung untuk desa tertinggal non-IDT, JPS, dan GKD telah banyak berkontribusi dalam usaha pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan fokus utama pada pengembangan industri kecil atau industri rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang penelitian, pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk atau jenis pemberdayaan ekonomi yang diterapkan di masyarakat pedesaan?
2. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di masyarakat pedesaan?
3. Apa peran para pemangku kepentingan (pemerintah dan kelompok) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan?
4. Kendala-kendala apa yang menghambat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di pedesaan?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk atau jenis pemberdayaan ekonomi yang ada di masyarakat pedesaan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tahapan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan.
3. Mendeskripsikan peran para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan.
4. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip dalam Moleong (2000), penelitian kualitatif merupakan "sebuah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan manusia dalam konteksnya sendiri serta berinteraksi dengan individu-individu tersebut menggunakan bahasa dan istilah yang mereka pahami." Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif yang dipilih adalah studi kasus, di mana peneliti mengumpulkan informasi secara mendalam mengenai kasus, proses, atau gejala yang berkaitan dengan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, fokus penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Jenis dan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam industri krupuk, yang meliputi:

Pemberian bantuan modal atau pinjaman modal, yang terdiri dari pinjaman modal bergulir serta modal individu yang disalurkan kepada para pengusaha krupuk ikan.

Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas krupuk ikan, antara lain: pengenalan bahan tambahan, strategi pemasaran, peningkatan kualitas produksi, serta pembinaan dalam manajemen teknologi, manajemen pemasaran, dan manajemen produksi.

Kegiatan studi banding ke daerah-daerah yang dikenal sebagai penghasil ikan dan produk ikan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan.

Mengikutsertakan pelaku usaha krupuk ikan dalam berbagai acara tertentu, seperti pameran *Expo*, *Road Show*, dan lain-lain, bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam industri krupuk ikan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pelepasan, tahap pengelompokan, dan tahap pengembangan. Peran para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan kelompok masyarakat, sangat penting dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi industri krupuk ikan di Desa Bukit Mas, dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Setia Abadi" sebagai aktor kunci. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di industri krupuk ikan, yang terdiri dari kendala internal dan eksternal.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menghabiskan banyak waktu di lapangan, sehingga kemudahan dalam pelaksanaan penelitian sangat penting. Menurut Hughes dalam Bogdan (1972), "setiap situasi sosial adalah laboratorium, di mana beberapa aspek kehidupan sosial dapat diteliti karena hal tersebut menjadi lebih jelas." Berdasarkan teori tersebut, pengusaha industri krupuk ikan di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dipilih sebagai lokasi penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Informan. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *snowball*, yang berarti setelah peneliti tiba di lokasi penelitian, peneliti akan menghubungi beberapa informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Tempat dan Peristiwa. Berbagai peristiwa atau kejadian yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian mencakup: jenis pemberdayaan, proses pemberdayaan, serta pelaksanaan pemberdayaan pengrajin krupuk ikan di Desa Bukit Mas, Kecamatan Langkat, Kabupaten Langkat.

Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan substansi penelitian, yang diperoleh dari instansi pemerintah (Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Bappekab, Kantor Camat Besitang, dan Kantor Desa Bukit Mas) serta dari lembaga non-pemerintah (BPD dan LPMD) dan kelompok Usaha Bersama (KUB) Setia Abadi.

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi serta menggambarkan secara rinci mengenai proses pemberdayaan masyarakat dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh dan menyajikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai lingkungan yang menyertai proses pemberdayaan pengusaha krupuk ikan.

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dokumentasi terkait proses pemberdayaan masyarakat.

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, merujuk pada metode analisis yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (1984). Mereka mengemukakan bahwa analisis data dengan model interaktif terdiri dari empat tahapan kegiatan, yaitu: Pengumpulan Data,

Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan, yang mencakup penggambaran serta verifikasi.

## HASIL PEMBAHASAN

Mengacu pada tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu fase pelepasan diri, fase pengelompokan diri, dan fase pengembangan diri, para pengusaha industri krupuk ikan di Desa Bukit Mas telah mencapai fase pengembangan diri. Namun, jika diteliti lebih mendalam, masing-masing tahapan tersebut secara keseluruhan belum dilalui dengan baik. Pada fase pengelompokan diri, para pengusaha krupuk ikan telah membentuk Kelompok Usaha Bersama "Setia Abadi". Namun, dalam pelaksanaannya, kelompok ini belum menunjukkan keberadaannya sebagai entitas yang berfungsi untuk membantu pengembangan anggotanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, disusunlah program-program pemberdayaan masyarakat bagi pengusaha krupuk ikan di Desa Kedungrejo, baik melalui program Pemerintah Kabupaten Langkat yang dikenal dengan "Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan" untuk mendapatkan bantuan kredit dari salah satu bank dengan dukungan dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu perjalanan yang panjang dan kompleks, yang menunjukkan bahwa hasil yang dicapai saat ini adalah buah dari perjuangan keras sekelompok pengusaha industri kecil krupuk ikan di Desa Bukit Mas, yang berlangsung secara bertahap dan mengalami fluktuasi. Pemberdayaan masyarakat pengusaha industri kecil krupuk ikan di Desa Bukit Mas bersifat mandiri, yang berarti bahwa kemajuan menuju pemberdayaan sangat bergantung pada inisiatif individu masing-masing. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan masyarakat (*enabling*), (2) memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki masyarakat (*empowerment*), dan (3) memberikan perlindungan kepada kelompok yang lemah agar tidak semakin terpuruk dalam menghadapi kekuatan yang lebih dominan.

Ketiga arah pemberdayaan tersebut berlandaskan pada dua tujuan utama, yaitu: menghapuskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan (Soemodiningrat, 1997).

Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: 1) Inisial, yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat; 2) Partisipatoris, yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk kepentingan rakyat; 3) Emanisipatif, yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat (Vidyandika dan Pranarka, 1996).

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki peran penting dalam: a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di pedesaan guna mendukung proses produksi, pengolahan, pemasaran, serta pelayanan sosial bagi masyarakat; b) mendorong partisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan; c) mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat modernisasi perekonomian masyarakat pedesaan melalui pengembangan agribisnis, dengan fokus pada pengembangan organisasi bisnis yang dikelola oleh masyarakat, didukung oleh pelaku ekonomi lainnya dalam bentuk kemitraan; d) meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas, kewirausahaan, dan ketahanan sosial masyarakat pedesaan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi sosial mereka. Selain itu, Kelompok Usaha Bersama (KUB) berperan dalam memberikan bantuan modal usaha melalui dana bergulir yang disalurkan kepada kelompok usaha bersama. KUB juga bertugas membina,

mengarahkan, dan mengendalikan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam membuka peluang pasar, terutama untuk pasar luar daerah dan pasar ekspor.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat meliputi: 1) Kendala internal, yang terdiri dari: a) keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, b) ketersediaan bahan baku pembuatan krupuk ikan yang tidak mencukupi, c) kemampuan manajerial yang terbatas, d) kurangnya kemampuan dalam mengelola peluang pasar yang ada serta modal usaha yang minim; 2) Kendala eksternal, yang mencakup: a) akses Koperasi Usaha Bersama (KUB) sebagai mitra pemerintah dan penghubung antara pemerintah dengan pengusaha krupuk ikan yang belum optimal, b) belum adanya dukungan dari pihak swasta yang secara nyata memberikan bantuan modal usaha sebagai kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN

Bentuk atau jenis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya bagi pengusaha krupuk ikan di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, mencakup: penyediaan bantuan modal, dukungan individu, pelatihan, studi banding, penyediaan bahan baku atau peralatan, serta perluasan akses pasar. Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat industri kecil di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: tahap pelepasan diri, tahap pengelompokan, dan tahap pengembangan yang mendukung oleh program yang telah ditetapkan meliputi: pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan usaha, dan pemberdayaan lingkungan.

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa meliputi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki peran sebagai berikut: a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di pedesaan untuk mendukung proses produksi, pengolahan, pemasaran, serta pelayanan sosial bagi masyarakat; b) mendorong partisipasi dalam pengelolaan pemanfaatan dan peningkatan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup demi mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa; c) mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan agribisnis, dengan fokus pada pengembangan organisasi bisnis yang dikelola oleh masyarakat, didukung oleh pelaku ekonomi lainnya dalam bentuk kemitraan; d) meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang dapat mendorong produktivitas, kewirausahaan, dan ketahanan sosial masyarakat desa untuk memperbaiki kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Sementara itu, Kelompok Usaha Bersama (KUB) berperan dalam memberikan bantuan modal usaha melalui dana bergulir yang disalurkan kepada KUB. KUB juga bertugas membina, mengarahkan, dan mengendalikan pemberdayaan masyarakat, termasuk membuka peluang pasar, terutama untuk pasar luar daerah dan pasar ekspor.

## PUSTAKA

Arfianto, U. Balahmar. 2014. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa." *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol 2(No 1 Maret 2014.).

Arsiyah. 2002. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang." *Universitas Brawijaya Malang*.

- Edi, Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Miles, B. Matthew & A. Michael Huberman. 1984. "Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Methods, SAGE Publication Inc." Beverly Hill, California.
- Moeljanto., Pranarka dan Vidyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) Dalam Pemberdayaan, Konsep Ke- Bijakan Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarinah, Iin, Sihabudin, Anwar, Suwarlan, Erlan. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran." *Jurnal MODERAT* Volume(Nomor 3, Agustus 2019).
- Soebianto, Mardikanto dan. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Soemodiningrat, Gunawan. 1997. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA dan Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zuliyah, Siti. 2010. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah." *Journal of Rural and Development*. Volume No(Agustus 2010.).